

# UPAYA INDONESIA MENGHAPUS BEA MASUK IKAN TUNA KE PASAR JEPANG

**Oleh: Adilah Yuliadista**

Email : [adilah.yuliadista1466@student.unri.ac.id](mailto:adilah.yuliadista1466@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax: 07561-63277

## **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the countries with the largest tuna production in the world. This can be seen from Indonesia's exports which have increased almost every year with the aim of exporting to various countries. Japan is one of the main destinations for Indonesian tuna exports. The import duty on tuna to the Japanese market is subject to a tariff of 3.5 percent. Meanwhile, in the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), it is stated that the import duty on tuna is abolished. Import duties on tuna in other ASEAN countries such as Thailand have been abolished. Therefore, this study aims to analyze Indonesia's efforts to eliminate the entry of tuna into the Japanese market.*

*According to the liberal theory, trade relations can have an impact on increasing welfare. The theoretical point from this perspective is that conflict and cooperation will shape international affairs. The research method that the author uses is descriptive qualitative method and uses data collection techniques in the form of library research.*

*The result of this research are by conducting economic diplomacy between Indonesia and Japan. Indonesia also carries out trade promotions through the Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE) and Seafood Expo Global (SEG) exhibitions. Improving the quality of fisheries is also carried out by Indonesia with the aim that Indonesian fishery products, especially tuna, are increasingly well known by Japan.*

**Keywords: economic diplomacy, IJEPA, import duty, tuna**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Daratannya dikelilingi oleh perairan luas yang menghasilkan produk kelautan yang besar. Ini menjadikan perusahaan yang ada di sektor perikanan dan kelautan Indonesia mendapatkan hasil laut yang berlimpah, sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu penghasil devisa terbesar untuk negara. Keberlangsungan usaha pada sektor ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas hasil laut baik di pasar lokal maupun luar negeri, oleh karena itu berdampak baik pada kesejahteraan para *stakeholder*.

Setiap negara dipacu untuk menciptakan efisiensi dalam produksi guna meningkatkan persaingan yang kompetitif. Perekonomian Indonesia akan mendapatkan keuntungan apabila produksi perikanan lokal memiliki kualitas yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkannya yakni dengan cara menjalin hubungan dagang dengan negara lain. Salah satu negara yang menjadi negara yang memiliki permintaan produk mentah atau olahan perikanan terbanyak dunia adalah negara Jepang.

Indonesia dalam mengeksport produk perikanan menjadi menjadikan Jepang sebagai negara tujuan utama setelah Amerika Serikat.<sup>1</sup> Swasembada pangan di Jepang memiliki rasio

sebesar 40%.<sup>2</sup> Sudah menjadi rahasia umum bahwa makanan khas Jepang didominasi oleh *seafood*. Jepang dikenal sebagai negara yang “miskin” akan Sumber Daya Alam (SDA). Negara Indonesia yang dikenal dengan sumber daya perikanan tentu melihat kondisi yang dialami Jepang ini sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah mempererat hubungan perdagangan bilateral kedua negara. Hal inilah yang menyebabkan dibentuknya *Indonesia - Japan Economic Partnerships* (IJEPA).

*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan kesepakatan hubungan kerjasama ekonomi secara bilateral antara Indonesia bersama Jepang di bidang perdagangan. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh kedua negara yang bersangkutan. Pertimbangan Indonesia memilih Jepang untuk menjalin kerjasama perdagangan bilateral karena Jepang merupakan negara yang menjadi mitra dagang Indonesia sejak lama dan juga Jepang merupakan negara yang menjadi pasar ekspor dan penanam modal terbesar bagi Indonesia. Di IJEPA sendiri liberalisasi investasi dalam perdagangan meliputi aktivitas menghapuskan atau meminimalisir hambatan perdagangan berupa bea masuk impor, lalu untuk investasi

---

<sup>1</sup> Pernyataan Machmud, Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Diakses di <https://kkp.go.id/artikel/13252-pameran-di-jepang-kkp-catat-nilai-potensi-transaksi-ekspor-perikanan-usd-42-62-juta> pada 15 November 2020 pukul 16.31 WIB.

---

<sup>2</sup> Karunia Saputri, “Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang”, Vol. 5 No. 4 2017, hlm. 1182. Diakses di [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal%20fix%20\(10-01-17-03-48-22\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal%20fix%20(10-01-17-03-48-22).pdf) pada 16 November 2020 pukul 00.20 WIB.

adalah perbaikan dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Sebelum perjanjian kerjasama IJEPa disepakati, kegiatan ekspor produk lokal ke pasar Jepang dikenakan tarif bea masuk yang terbilang tinggi oleh Jepang. Semua komoditas ekspor juga diharuskan melewati tahap-tahap pemeriksaan supaya komoditas ekspor tersebut sesuai dengan standarisasi yang diterapkan Jepang. Dapat dikatakan bahwa ini menjadi sebuah penghambat yang berpengaruh terhadap ekspor produk Indonesia ke Jepang, terutama pada sektor perikanan dan kelautan dan juga menghapuskan kesempatan yang baik dalam pengembangan ekspor produk Indonesia melalui kerja sama IJEPa.<sup>4</sup> Meski dampak IJEPa sangat besar terhadap komoditas perdagangan dan investasi tertentu bagi kedua negara, namun perjanjian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap komoditas perdagangan tuna dari Indonesia ke Jepang.

Indonesia memasok lebih dari 16% produksi tuna dunia sebesar 7,7 juta ton.<sup>5</sup> Berdasarkan data *International*

*Trade Center* (ITC),<sup>6</sup> volume produksi tuna di Indonesia pada tahun 2017 mencapai hampir sekitar 293 ribu ton. Produksi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 273 ribu ton. Produksi tuna di Indonesia telah menurun pada 2015 karena ada moratorium penangkapan ikan pada kapal ikan eks asing dari November 2014 hingga Oktober 2015 karena upaya Indonesia untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU).

Dalam beberapa pos tarif, Jepang menghapuskan tarif bea masuk untuk komoditas ekspor Indonesia, yang mana ketentuan ini termuat dalam skema IJEPa.<sup>7</sup> Pada tahun 2000 hingga 2019, tarif bea masuk untuk tuna *bigeye* (HS030234), tuna *yellowfin* (HS030232), tuna *southern bluefin* (HS030236), tuna *albacore* (HS030231), dan tuna *skipjack* (HS030233) dalam bentuk beku dan segar adalah 3,5% di Jepang.<sup>8</sup> Sedangkan pada IJEPa, bea masuk tuna 2017 sebesar 0,45% dan pada tahun 2018 hingga 2023 sebesar 0%.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Paskalia Sabtaliani Sandori, "Kerugian Indonesia dalam Kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPa)", 2016, hlm. 2. Diakses di <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/download/2483/2116> pada 16 November pukul 00.25 WIB.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> KKP, "Pesona Tuna Sebagai Penggerak Bisnis Perikanan Indonesia", 2018, diakses di <https://kkp.go.id/artikel/4409-pesona-tuna-sebagai-penggerak-bisnis-perikanan-indonesia> pada 13 Desember 2020 pukul 01.20 WIB.

---

<sup>6</sup> ITC. "Existing and potential trade between Indonesia and Japan (Product: 0302 Fish, fresh or chilled)". Diakses di <https://www.trademap.org/> pada 15 Desember 2020 pukul 10.58 WIB.

<sup>7</sup> "Factsheet IJEPa", di [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180515\\_factsheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_factsheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf) diakses pada 15 November 2020 pukul 22.00 WIB.

<sup>8</sup> *Japan Customs*, "Japan's Tariff Schedule as of Oct 1 2020", 2020, dapat diakses di [https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020\\_10\\_data/e\\_03.htm/](https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020_10_data/e_03.htm/) pada 2 Desember 2020 pukul 09.22 WIB.

<sup>9</sup> Kemenkeu, "Peraturan Kemenkeu RI No.30.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang

Tidak ada penurunan bea masuk untuk produk tuna dari sebelum dan sesudah IJEPA diterapkan.

Tidak maksimalnya Indonesia dalam melakukan ekspor ikan tuna ke Jepang pasca implementasi IJEPA tidak lain dikarenakan masih dihambatnya ekspor ikan tuna oleh bea masuk di Jepang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mengetahui alasan mengapa Jepang tidak membebaskan tarif bea masuk perikanan Indonesia seperti Vietnam dan Thailand, yang mana Thailand dibebaskan karena adanya perjanjian bilateralnya dengan Jepang melalui *Japan-Thailand Economic Partnership Agreement* (JTEPA). Selama ini Jepang tidak menyampaikan alasannya hingga saat ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan pertanyaan penelitian: **“Bagaimana Upaya Indonesia Menghapus Bea Masuk Ikan Tuna ke Pasar Jepang?”**

## KERANGKA TEORI

### Perspektif Liberalisme

Penulis menggunakan perspektif liberalisme yang memperhatikan prinsip bekerja sama untuk saling menguntungkan. Immanuel Kant menyumbangkan pemikirannya

---

mengenai suatu Kemitraan Ekonomi”, 2017, hlm. 15, diakses di <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/30~PMK.010~2017Per.pdf> pada 10 Desember 2020 pukul 10.47 WIB.

<sup>10</sup> Pernyataan Nilanto Perbowo, Dikjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) yang dimuat di <https://kumparan.com/kumparanbisnis/lobi-tiada-henti-susi-demi-bebas-bea-masuk-ikan-ke-jepang/full> pada 16 November 2020 pukul 07.06 WIB.

tentang liberalisme.<sup>11</sup> Immanuel Kant berpendapat bahwa hubungan dagang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan.<sup>12</sup> Perdagangan bebas akan membawa keuntungan material bagi masing-masing negara-bangsa. Poin teoritis dari perspektif ini adalah konflik dan kerja sama akan membentuk urusan internasional. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, kaum liberal memiliki keyakinan bahwa mereka akan bekerja sama untuk saling menguntungkan.

### Tingkat Analisa Negara-Bangsa

Tingkat analisa yang penulis gunakan adalah negara-bangsa (*nation-state*). Penulis memilih level analisa negara-bangsa dengan alasan karena yang melakukan kerjasama dalam kegiatan ekspor-impor ikan tuna di tulisan ini adalah Indonesia dan Jepang. Hal tersebut menandakan bahwa pada dasarnya analisa dalam hubungan internasional didasarkan pada negara-bangsa, karena dalam hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Sehingga perilaku dari aktor non-negara, seperti individu, organisasi, kelompok kepentingan dan lainnya, akan diperhatikan jika berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan.<sup>13</sup>

### Teori Diplomasi Ekonomi

Berridge dan James (2001) dan Baldwin (1985) mendefinisikan

---

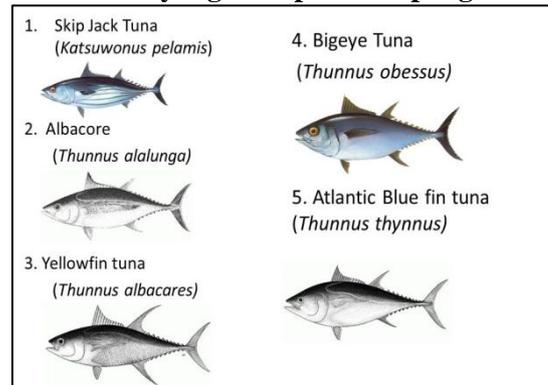
<sup>11</sup> Robert Jakson dan Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 174.

<sup>12</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, “Studi dan Teori Hubungan Internasional”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 90.

<sup>13</sup> Mohtar Mas’oed, *op. cit.*, hlm. 46.

diplomasi ekonomi secara luas, yaitu mencakup tujuan ekonomi dan politik/strategis.<sup>14</sup> Berridge dan James memandang bahwa diplomasi ekonomi melibatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai suatu tujuan kebijakan luar negeri. Baldwin, dengan pemahaman yang sama, menggunakan istilah *economic statecraft* untuk menggambarkan penggunaan strategis sanksi ekonomi positif dan negatif untuk mendorong negara atau aktor lain untuk bekerja sama.

**Gambar 1 Jenis-jenis ikan tuna Indonesia yang diekspor ke Jepang**



Sumber:

<https://slideplayer.com/slide/9470809/>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Gambaran Umum Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Jepang

#### Jenis Ikan Tuna

Indonesia merupakan salah satu negara-negara pengekspor produk ikan tuna terbesar di dunia. Sejak 17 tahun terakhir, pasar internasional ikan tuna Indonesia cenderung meningkat.<sup>15</sup> Hampir 90% permintaan pasar dunia tuna segar dan beku terpusat di Jepang sejak mayoritas orang Jepang suka mengonsumsi sushi dan sashimi.<sup>16</sup>

Tahun	Volume (Kg)	Nilai (USD)
2015	5.864.864	31.084.803
2016	6.046.825	33.474.679
2017	4.158.680	23.919.164
2018	2.831.770	16.197.165
2019	2.260.401	12.139.541

Tuna Indonesia yang diekspor ke Jepang antara lain tuna *bigeye* (HS030234), tuna *yellowfin* (HS030232), tuna *southern bluefin* (HS030236), tuna *albacore* (HS030231), dan tuna *skipjack* (HS030233). Tuna Indonesia yang terdiri dari segar, beku, dan kalengan, mendominasi pasar Jepang karena permintaan protein ikan masih tinggi di negara ini. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai jenis ikan tuna Indonesia dalam kondisi segar dan beku.

#### Ekspor Tuna Indonesia ke Jepang

Jepang adalah salah satu konsumen Tuna terbesar di dunia. Hampir 90% permintaan pasar dunia akan tuna segar dan beku terpusat di Jepang karena mayoritas masyarakat Jepang suka mengonsumsi sushi dan

<sup>14</sup> Buletin Shafiah F. Muhibat dan Rocky Intan, "Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Analisis Perjanjian Ekonomi Internasional, Forum Internasional, dan Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi di Masa Pandemi", *CSIS Indonesia*, hlm 3-4.

<sup>15</sup> Suhana, Tridoyo Kusumastanto, Luky Adrianto, Achmad Fahrudin, "*Tuna industries competitiveness in international market. Case of Indonesia*", Desember 2016, Vol. 9 No. 6, hlm. 1251. Diakses di <http://www.bioflux.com.ro/aacl> pada 19 Januari 2021 pukul 15.04 WIB.

<sup>16</sup> Daniel D. Benetti, Gavin J. Partridge dan Alejandro Buentello (2016), "*Advances in Tuna Aquaculture: From Hatchery to*

*Market*", US: Elsevier Inc., hal. 234, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411459-3.00009-6>

sashimi.<sup>17</sup> Sushi menjadi masakan mewah setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, dan dikonsumsi pada acara-acara tertentu. Pada tahun 1970-an dan 1980-an tuna sirip biru menjadi barang kelas atas karena konsumen lebih suka mengonsumsi jenis ikan putih yang kandungan lemaknya tinggi.<sup>18</sup>

**Tabel 1 Ekspor Tuna Indonesia ke Jepang sebelum IJEPA tahun 2002-2008**

Sumber: BPS (2017)

**Tabel 2 Volume dan nilai ekspor produk ikan tuna Indonesia ke Jepang tahun 2015-2019**

Sumber: UN Comtrade berdasarkan statistik *Japanese Ministry of Finance* (diolah)

Berdasarkan tabel di atas,<sup>19</sup> ekspor tuna Indonesia ke Jepang cenderung berfluktuasi sejak tahun 2015 baik dari segi volume maupun nilainya. Dari sisi volume tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ekspor tuna Indonesia ke Jepang dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 dan 2016, ekspor tuna Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta dan 6 juta kilogram dengan pendapatan sekitar 31 juta USD pada 2015 dan meningkat menjadi 33 juta USD pada tahun 2016 dengan total volume ekspor yang sama. Dari sisi nilai volume, ekspor ikan tuna

<sup>17</sup> Daniel D. Benetti, Gavin J. Partridge dan Alejandro Buentello, op. cit.

<sup>18</sup> Jose Fernandez dan Polanco Ignacio Lorente, “*Tuna Economic and Market*”, *Academic Press*, 2016, hlm. 335, diakses di <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-411459-3.00014-X> pada 13 April 2021 pukul 19.18 WIB.

<sup>19</sup> ITC, “*Existing and potential trade between Indonesia and Japan (Product: 0302 Fish, fresh or chilled)*”, 2020, diakses di <https://www.trademapp.org/> pada 2 Desember 2020 pukul 13.05 WIB.

Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga 2019.

Data tersebut menunjukkan bahwa tuna baik tuna mentah maupun tuna olahan merupakan komoditas perdagangan penting Indonesia ke Jepang. Namun, eksportir tuna Indonesia masih memiliki kendala untuk menjual produknya ke Jepang, meskipun kedua negara telah meratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi bilateral. Tak pelak muncul

Tahun	Volume (ton)	Nilai (USD)
2002	30.724,9	90.944
2003	23.881,3	73.164
2004	22.771,1	87.566
2005	21.288,2	76.622
2006	21.647,3	76.250
2007	19.818,6	70.499
2008	18.931,3	73.718

pertanyaan, apakah IJEPA sudah efektif diterapkan atau belum.

Sebagaimana di subbab sebelumnya, IJEPA bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara dengan merampingkan perdagangan. Namun demikian, data tersebut mengungkapkan bahwa IJEPA tidak memberikan dampak positif terhadap komoditas tuna terukur terhadap volume dan nilai ekspor. Meskipun demikian, meskipun sektor tuna olahan telah ditingkatkan nilainya, tetapi tidak termasuk komoditas yang memiliki keistimewaan penghapusan tarif berdasarkan IJEPA.

### Pasar Tuna di Jepang

Secara tradisional, sistem distribusi konsumsi perikanan di pasar Jepang memiliki susunan berlapis-lapis yang utuh antara penjual grosir di *landing site*, pengecer pasar ikan dan

pedagang grosir sebelum akhirnya menuju pelanggan.<sup>20</sup> Susunan tersebut dikembangkan akibat beragamnya macam-macam ikan yang ditangkap oleh nelayan Jepang, dan permintaan konsumen terhadap ikan yang masih segar. Susunan itu telah menuai kritik-kritik dari bermacam aktor-aktor internasional dan lokal dikarenakan secara ekonomi tidak efektif. Berikut pasar tuna yang ada di Jepang:<sup>21</sup>

### **Grosir di landing site**

Pada tahun 2013, 822 pelabuhan dari hampir tiga ribu pelabuhan di Jepang mempunyai pasar pendaratannya masing-masing. Apabila nelayan-nelayan telah mengambil hasil yang ditangkapnya di pelabuhan, ikan kemudian akan dipilih-pilih guna diproses, lalu diberi makan atau diperjualkan sebagai konsumsi segar yang dilihat terbih dahulu kualitas dan ukurannya. Harga dirundingkan oleh mediator yang berlaku sebagai wakil komite bagi nelayan yang ada di wilayah itu.

### **Pasar Grosir Sentral**

Terdapat beberapa pasar grosir sentral di hampir tiap kota-kota besar Jepang yang dibangun oleh pemerintah domestik negara tersebut. Ukuran-ukuran fasilitas pasar beranekaragam ukurannya, tetapi berguna untuk langkah awal

penyaluran di lokasi konsumsi sendiri-sendiri dan menguru ikan-lokal maupun yang diimpor. Banyak pasar grosir sentral dan juga volume kegiatan jual beli terus mengalami penurunan, sebuah tren yang diduga akan terus berlangsung.

### **Pasar Grosir Pusat Metropolitan Tokyo**

Tsukiji merupakan Pasar Grosir Pusat Metropolitan Tokyo yang sudah dikenal oleh semua industri perikanan global akan perlelangan ikan tuna paginya dan stan-stan grosir kecilnya yang memperjualbelikan bermacam-macam variasi konsumsi laut. Pasar Tsukiji selalu buka tiap hari mulai dan mulai beroperasi di jam tiga pagi. Tsukiji menjadi tuan rumah kegiatan perlelangan ikan tuna tahun baru yang mana satu tuna harganya bisa melewati nominal 1,7 juta USD, sehingga pasar ini dikenal dengan pasar konsumsi hasil laut terbesar di dunia.

### **Saluran Ritel**

Supermarket merupakan tempat mayoritas masyarakat Jepang membeli konsumsi makanan-makanan laut. Ito Yokado dan AEON adalah 2 pengecer supermarket lokal terbesar di Jepang. Toserba atau minimarket yang menjadi pengecer makanan laut yang menyebar luas di Jepang juga ada, yakni *Lawson*, *Seven Eleven* dan *Family Mart*. Kompetisi harga yang intens, pembaruan dan juga penyebaran kedua jaringan ini selama sepuluh tahun terakhir, akan ada kemungkinan pasar untuk meletakkan harga yang lebih terjangkau.

<sup>20</sup> FAO, “*The Japanese market for seafood*”, 2015, diakses di <http://www.fao.org/3/bc012e/bc012e.pdf> pada 13 Februari 2021 pukul 22.03 WIB.

<sup>21</sup> Indonesian Trade Promotion Center Osaka, “*Market Brief Tuna HS 0302 Final*”, 2020, hlm. 16-18, diakses di <http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2020/12/Market-Brief-Tuna-HS-0302-Final.pdf> pada 13 Februari 2021 pukul 22.28 WIB.

### ***Trading House (sougou shousha)***

*Trading house* berhubungan dengan barang atau komoditas dari luar negeri dan juga aliran di luar pasar Tsukiji yang sedang mengalami peningkatan, contohnya melakukan kegiatan berjualan secara langsung ke ritel. *Trading house* マルハニチロ, キョクヨ, 日本水産 merupakan perusahaan tiga besar yang terbesar di dunia akan makanan lautnya.

### ***Indonesia - Japan economic Partnerships (IJEPA)***

*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan kesepakatan hubungan kerjasama ekonomi secara bilateral antara Indonesia bersama Jepang di bidang perdagangan. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh kedua negara yang bersangkutan. Pertimbangan Indonesia memilih Jepang untuk menjalin kerjasama perdagangan bilateral karena Jepang merupakan negara yang menjadi mitra dagang Indonesia sejak lama dan juga Jepang merupakan negara yang menjadi pasar ekspor dan penanam modal terbesar bagi Indonesia. Di IJEPA sendiri liberalisasi investasi dalam perdagangan meliputi aktivitas menghapuskan atau meminimalisir hambatan perdagangan berupa bea masuk impor, lalu untuk investasi adalah perbaikan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Sebelum perjanjian kerjasama IJEPA disepakati, kegiatan ekspor produk lokal ke pasar Jepang dikenakan tarif bea masuk yang terbilang tinggi oleh Jepang. Semua komoditas ekspor juga diharuskan melewati tahap-tahap

pemeriksaan supaya komoditas ekspor tersebut sesuai dengan standarisasi yang diterapkan Jepang. Dapat dikatakan bahwa ini menjadi sebuah penghambat yang berpengaruh terhadap ekspor produk Indonesia ke Jepang, terutama pada sektor perikanan dan kelautan dan juga menghapuskan kesempatan yang baik dalam pengembangan ekspor produk Indonesia melalui kerja sama IJEPA.<sup>23</sup> Meski dampak IJEPA sangat besar terhadap komoditas perdagangan dan investasi tertentu bagi kedua negara, namun perjanjian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap komoditas perdagangan tuna dari Indonesia ke Jepang.

Ratifikasi IJEPA menandai era baru kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. IJEPA merupakan perjanjian bilateral terlengkap yang terdiri dari 15 bab dengan 154 pasal.<sup>24</sup> *Economic Partnership Agreement* antara Jepang dan Indonesia diawali dengan pertemuan persiapan di Tokyo, 8 September 2003, pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Tri Mardjako, Direktur kerjasama bilateral MITI Republik Indonesia, dan Bapak Fumio Yawata, Direktur Divisi FTA/EPA, Biro Ekonomi, MOFA Jepang. Rapat persiapan ini membahas beberapa isu antara lain perdagangan barang dan jasa, prosedur kepabeanan, mobilitas tenaga kerja, kekayaan intelektual, saling pengakuan/standar dan kesesuaian, investasi, pengadaan pemerintah, kerjasama, dan lingkungan bisnis.

### **Tarif Bea Masuk Tuna Indonesia di Pasar Jepang**

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Supancana, I, 2011, "Legal Issues Regarding Foreign Investment and the Implementation of the Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement". *Journal Of East Asia & International Law*. Diakses di [http://journal.yiil.org/home/archives\\_v4n1\\_07](http://journal.yiil.org/home/archives_v4n1_07), Vol. 4 No. 1, hlm. 131.

<sup>22</sup> Paskalia Sabtaliani Sandori, "Kerugian Indonesia dalam Kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)", 2016, hlm. 2. Diakses di <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/download/2483/2116> pada 16 November pukul 00.25 WIB.

Dalam beberapa pos tarif, Jepang menghapuskan tarif bea masuk untuk komoditas ekspor Indonesia, yang mana ketentuan ini termuat dalam skema IJEPA.<sup>25</sup> Pada skema IJEPA, bea masuk tuna 2017 sebesar 0,45% dan pada tahun 2018 hingga 2023 sebesar 0%.<sup>26</sup> Sedangkan pada tahun 2000 hingga 2019, tarif bea masuk untuk tuna *bigeye* (HS030234), tuna *yellowfin* (HS030232), tuna *southern bluefin* (HS030236), tuna *albacore* (HS030231), dan tuna *skipjack* (HS030233) dalam bentuk beku dan segar adalah 3,5% di Jepang.<sup>27</sup> Dapat dilihat bahwa bea masuk untuk produk tuna dari sebelum dan sesudah IJEPA diterapkan tidak mengalami penurunan, apalagi dihapuskan.

Pada tabel di atas,<sup>28</sup> menunjukkan tarif bea masuk ikan tuna Indonesia ke Jepang tahun 1996-2020. Terlihat bahwa pada tahun 1996 merupakan tarif bea masuk ikan tuna yang paling tinggi di pasar Jepang, yakni sebesar 4,4%. Bea masuk tuna kemudian turun menjadi 3,8% pada tahun 1998. Kemudian angkanya turun lagi menjadi 3,5% pada tahun 2000

<sup>25</sup> "Factsheet IJEPA", op. cit.

<sup>26</sup> Kemenkeu, "Peraturan Kemenkeu RI No.30.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi", op. cit.

<sup>27</sup> *Japan Customs*, "Japan's Tariff Schedule as of Oct 1 2020", 2020, dapat diakses di [https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020\\_10\\_data/e\\_03.htm/](https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020_10_data/e_03.htm/) pada 2 Desember 2020 pukul 09.22 WIB.

<sup>28</sup> Skripsi Kartika Eka Wardhani, "Daya Saing Ekspor Komoditas Tuna Indonesia Di Pasar Jepang, 1996-2006", *BAPPENAS*, diakses di [https://hub.satudata.bappenas.go.id/cs\\_CZ/dataset/groups/daya-saing-ekspor-komoditas-tuna-indonesia-di-pasar-jepang-1996-2006](https://hub.satudata.bappenas.go.id/cs_CZ/dataset/groups/daya-saing-ekspor-komoditas-tuna-indonesia-di-pasar-jepang-1996-2006) pada 14 Februari 2021 23.58 pukul WIB.

hingga 2020. Tidak ada penurunan *import duty* lagi hingga sekarang.

Pada tahun 2006, Jepang dan Indonesia mampu menyelesaikan Kerjasama bilateral melalui perundingan yang disebut dengan *Indonesia-Japan Economic Agreement Partnership* (IJEPA). Salah satu tujuan dari IJEPA ini yakni peningkatan penetrasi dan akses pasar guna meningkatkan nilai serta volume perdagangan kedua negara. Lingkup kerjasamanya meliputi aktivitas menghapuskan atau meminimalisir hambatan perdagangan berupa bea masuk impor, lalu untuk investasi adalah perbaikan dan kepastian hukum.

### **Upaya Indonesia Menghapus Bea Masuk Ikan Tuna ke Pasar Jepang**

### **Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Jepang**

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pembebasan bea masuk ikan tuna salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan dengan dengan pihak pemerintah Jepang. Indonesia sudah melakukan negosiasi terkait penurunan hingga penghapusan bea masuk impor ikan tuna sejak tahun 2015 melalui *General Review* IJEPA. Kegiatan agar bea masuk ikan tuna dilakukan terus-menerus hingga tujuan Indonesia dalam meningkatkan ekspor komoditas tuna tercapai. Pertemuan KKP dengan pihak Jepang terjadi selama dua kali, yakni bersama Menteri Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Jepang dan Menteri Luar Negeri Jepang. Kedua pertemuan ini dilakukan pada tahun 2017 di Tokyo. Pertemuan ini akan membahas mengenai upaya Indonesia untuk menghapus bea

masuk ikan tuna dengan cara meningkatkan produksi ikan tuna dan mengajak negara Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Berikut akan dijelaskan di subbab-subbab di bawah ini.

### **Diplomasi Ekonomi dengan Menteri Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Jepang**

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan-hambatan yang berhubungan dengan sektor perikanan tentu diwakilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dalam mengupayakan pembebasan bea masuk ikan tuna, pihak Indonesia mengadakan pertemuan Bersama pihak pemerintah Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Agustus 2017 yang bertempat di Tokyo.<sup>29</sup> Dari pihak pemerintah Jepang yang menjadi perwakilan dalam pertemuan ini adalah Ken Saito. Ken Saito meupakan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Jepang. Menteri Susi didampingi oleh Nilanto Prabowo selaku Dikjen PDSPKP.

Pada pertemuan ini KKP menyinggung mengenai penghapusan bea masuk ikan tuna Indonesia ke pasar Jepang. KKP mengatakan bahwa banyak perusahaan Indonesia, seperti PT. Aneka Tuna dan PT. ITOCHU yang ingin mengimpor di Jepang. Hal tersebut membuat perusahaan industri ikan tuna Indonesia yang ada di Jepang tersebut melakukan relokasi ke Indonesia dikarenakan

---

<sup>29</sup> KKP, (2017), "KKP Upayakan Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke Jepang", *op. cit.*

masih ditetapkannya kebijakan bea masuk perikanan Indonesia di Jepang. Penetapan bea masuk ini tentunya membuat perusahaan tadi berpikir dua kali untuk melakukan kegiatan ekspor ke Jepang.

KKP dalam pertemuan ini meminta agar pembahasan terkait bea masuk ini segera ditindaklanjuti. Dalam kegiatan ekspor-impor Indonesia-Jepang dalam produk perikanan Indonesia, terutama ikan tuna yang paling banyak diminati, KKP mengatakan tidak hanya perusahaan Indonesia yang dirugikan dalam perdagangan ini, pedagang Jepang yang melakukan relokasi usahanya ke Indonesia pun juga dirugikan. Hal ini dikarenakan apabila mereka mengirim barangnya ke Indonesia, kemudian akan dikirim Kembali ke Jepang tentu akan dikenakan bea masuk tersebut.

### **Diplomasi Ekonomi dengan Menteri Luar Negeri Jepang**

Sehari setelah pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Menteri Saito, pada 21 Agustus, KKP kembali bertemu dengan orang yang juga memiliki jabatan penting di Jepang, yakni Menteri Kono. Menteri Kono merupakan Menteri Luar Negeri Jepang. Pertemuan Menteri Susi dan Menteri Kono berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2017.<sup>30</sup> Hanya berjarak sehari dengan pertemuan sebelumnya.

---

<sup>30</sup> KKP, "Bertemu Menlu Jepang, Menteri Susi Perkuat Kerja Sama Maritim Kedua Negara", 24 Agustus 2017, diakses di <https://news.kkp.go.id/index.php/bertemu-menlu-jepang-menteri-susi-perkuat-kerja-sama-maritim-ke-dua-negara/> pada 26 April 2021 pukul 01.30 WIB.

Pada pertemuan ini, KKP bertujuan untuk memperjelaskan komitmen dan kesungguhan Indonesia dalam mengurus permasalahan-permasalahan yang terdapat di Indonesia. Pertemuan ini bukan hanya membahas mengenai Kerjasama dalam penanganan keamanan maritim di laut Natuna, tetapi juga memfokuskan di *free navigation* dan kerjasama di bidang perikanan Indonesia yang mana juga terkait dengan penghapusan bea masuk tuna Indonesia. Ini juga membahas mengenai peringatan 60 tahun Kerjasama Indonesia dan Jepang di tahun 2018 mendatang.

### **Mengikuti Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-Jepang**

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, dalam *Indonesia-Japan Business and Investment* mengadakan pertemuan dengan delegasi bisnis Jepang, yakni Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang/*Japan External Trade Organization* (JETRO). Pertemuan berlangsung tanggal 29 Januari 2019 di Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia.

Menteri Susi menyebutkan bahwa perdagangan produk perikanan termasuk tuna dan udang ke Jepang memberikan peluang keuntungan bisnis yang sangat besar. Di forum ini, Menteri Susi juga menyinggung mengenai untuk melanjutkan peningkatan kerjasama antara para *stakeholder* Indonesia-Jepang maupun bersama negara lain, seperti delegasi dari Eropa dan Amerika.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> KKP, "Indonesia-Japan *Business Forum and Investment*", 2019, diakses di <http://news.kkp.go.id/index.php/kabar-kkp-indonesia-japan-business-and-investment->

### **Promosi Dagang**

Indonesia dalam upaya mengurangi bea masuk tuna ke Jepang juga melakukan kegiatan promosi dagang produk perikananannya. Pengurangan bea masuk produk tuna terdapat dua promosi dagang yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang, antara lain pameran *Japan-International Seafood and Technology Expo* (JITSE) dan *Seafood Expo Global*.

### **Mengikuti Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE)**

*Japan International Seafood and Technology Expo* (JISTE) adalah pameran yang diikuti oleh 800 exhibitor berasal dari 20 negara dengan sekitar 1.400 stan, dan dihadiri oleh industri retail, layanan makanan, grosir, pemasaran, *food processing* dan distributor dari seluruh wilayah Jepang dan sekitarnya. Ini juga merupakan pameran *seafood* terbesar di Jepang.<sup>32</sup> Pameran ini diadakan dari tanggal 21 hingga 23 Agustus 2019 di Tokyo Big Sight, Jepang.

## **5. Peningkatan Mutu Perikanan**

### **Mengadakan Our Ocean Conference (OOC)**

Pemerintah Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah *Our Ocean Conference* (OOC) kelima di Bali pada 29 dan 30 Oktober 2018. OOC difokuskan untuk menghasilkan komitmen dan

---

*forum/* pada 01 Maret 2021 pukul 00. 26 WIB.

<sup>32</sup> Kemlu RI, "Keikutsertaan KKP pada JISTE 2019", 2019, diakses di <https://kemlu.go.id/tokyo/id/news/1771/keikutsertaan-kkp-pada-jiste-2019> pada 26 Februari 2021 pukul 15.37 WIB.

mengambil tindakan untuk menjaga kelestarian laut kita.

Pelaksanaan kegiatan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara KKP dan Kemenlu RI. Terdapat tujuh kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2200 perwakilan yang mengonfirmasi kehadiran.<sup>33</sup> Diduga anggotanya akan terus meningkat.

OOC 2018 akan terus berfokus pada kawasan lindung laut, perikanan berkelanjutan, polusi laut, dan dampak terkait perubahan iklim terhadap lautan. Konferensi ini akan terdiri dari pertemuan pleno, pameran dan *Our Ocean, Our Legacy Youth Leadership Summit*.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pembebasan bea masuk ikan tuna salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan dengan dengan pihak pemerintah Jepang. Pertemuan KKP dengan pihak Jepang terjadi selama dua kali, yakni bersama Menteri Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Jepang dan Menteri Luar Negeri Jepang. Kedua pertemuan ini dilakukan pada tahun 2017 di Tokyo. Pertemuan ini akan membahas mengenai upaya Indonesia untuk menghapus bea masuk ikan tuna dengan cara meningkatkan produksi ikan tuna dan mengajak negara Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> *Our Ocean*, "OOC: *Our Ocean, Our Legacy*", 2018, diakses di <https://ourocean2018.org/> pada 01 Maret 2021 pukul 00.07 WIB.

Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk mempromosikan produk tunanya di pasar Jepang dengan mengikuti beberapa pameran seperti JISTE dan *Seafood Expo Global*. JISTE adalah pameran yang diikuti oleh 800 exhibitor berasal dari 20 negara dengan sekitar 1.400 stan, dan dihadiri oleh industri retail, layanan makanan, grosir, pemasaran, *food processing* dan distributor dari seluruh wilayah Jepang dan sekitarnya. Selanjutnya ada promosi dagang *Seafood Expo Global*. Beberapa produk yang dipromosikan dalam pameran SEG 2018 antara lain berupa produk segar (tuna), produk olahan beku (tuna, cakalang, *oilfish*, cumi-cumi, kepiting, kakap merah, udang, ikan kerapu, gurita) dan produk kaleng (rajungan, sarden, *clam*, dan tuna)

Upaya-upaya yang sudah dilakukan Indonesia dalam penghapusan bea masuk ikan tuna Indonesia ke pasar Jepang hingga sekarang belum mendapatkan hasil. Menteri Saito mengatakan perlunya melakukan perundingan lebih lanjut untuk memutuskan hal tersebut oleh kedua negara karena hal ini bersifat *G to G*. Pihak Jepang berharap agar kerjasama kedua negara dapat dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Benetti, Daniel D., Gavin J. Partridge dan Alejandro Buentello. *Advances in Tuna Aquaculture: From Hatchery to Market*. US: Elsevier Inc., 2016.

Jakson, Robert, and Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan*

- Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rinaldy, Eddie, Denny Ikhlas, and Ardha Utama. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sattar. *Buku Ajar Perekonomian Indonesia*. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
- Fitriyana. "Pengaruh Harga Terhadap Volume Ekspor Udang Beku (Studi Kasus di PT. Misaja Mitra, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 4 No. 1 (2007): 18–22. <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-4-no-1-fitri.pdf>.
- Rochman, Fathur, Bram Setyadji dan Arief Wujdi. "Standardizing CPUE of Albacore Tuna (*Thunnus Alalunga Bonnaterre*, 1788) On Tuna Longline Fishery In Eastern Indian Ocean". *Indonesian Fisheries Research Journal*. Vol. 23 No. 1 (2017): 29-38. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/ifrj/article/download/5451/5180>.
- Rochman, Fathur Maya Agustina, dan Gussasta Levi Arnenda. "Total Allowable Catch of Indonesian Southern Bluefin Tuna *Thunnus maccoyii* and Its Potential Resources in The Indian Ocean". *The 3rd International Symposium on Marine and Fisheries Research*. Vol. 147 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014702013>.
- Fernandez, Jose dan Polanco Ignacio Lorente. "Tuna Economic and Market". *Academic Press*. (2016): 333-350. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-411459-3.00014-X>.
- Parkes, Graeme, James A. Young, Suzannah F. Walmsley, dkk. "Behind the Signs—a Global Review of Fish Sustainability Information Schemes". *Reviews in Fisheries Science*. Vol. 18 No. 4 (2010): 344–356. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103321899>
- Sandori, Paskalia Sabtaliani. "Kerugian Indonesia dalam Kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)". *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*. Vol. 8 No. 2 (2016): 1-20. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/download/2483/2116>
- Saputri, Karunia. "Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang". *Portal Karya Ilmiah*. 5, no. 25 (2017): 1179-1194. <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=6302>

- Suhana, Tridoyo Kusumastanto, Luky Adrianto, Achmad Fahrudin. "Tuna industries competitiveness in international market. Case of Indonesia". *AAFL Bioflux*. Vol. 9 No. 6 (2016): 1251-1259.  
<http://www.bioflux.com.ro/aacl>
- Suman, Ali, Hari Eko Irianto, Khairul Amri, Budi Nugraha dan Gatut Bintoro. "Population Structure and Bioreproduction of Bigeye Tuna (*Thunnus Obesus*) In Western Part of Sumatera and Southern Part of Java and Nusa Tenggara, Indian Ocean". *Indonesian Fisheries Research Journal*. Vol. 21 No. 2 (2015): 109-116.  
<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/ifrj/article/view/183/185>.
- Uchida, Hirotosugu, Cathy A. Roheim, Hiroki Wakamatsu dan Christopher M. Anderson. "Do Japanese Consumers Care About Sustainable Fisheries? Evidence From an Auction of Ecolabelled Seafood". *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*. Vol. 58 No. 2 (2014): 263-280.  
<https://ageconsearch.umn.edu/record/260084/files/ajar12036.pdf>.
- Asia Pacific – Fish Watch. "Tuna Albacore".  
<Http://www.asiapacfish.org/index.php/species/item/23-albacore-tuna> (diakses 19 Januari 2021).
- Bonar Ikhwan F. "Export News Indonesia: Yellowfin Tuna". Kemendag. 2015.  
[http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/admin/docs/publication/8981455002545.pdf](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8981455002545.pdf) (diakses 19 Januari 2021).
- FAO. "Globefish Highlights April 2019 Issue – A Quarterly Update on World No. 2:14-18." 2020.  
<http://www.fao.org/3/ca5307en/ca5307en.pdf> (diakses 5 Mei 2020).
- FAO. "Globefish Highlights July 2018 Issue – A Quarterly Update on World 3:15-18." 2019.  
<http://www.fao.org/3/CA1531EN/ca1531en.pdf> (diakses 5 Mei 2020).
- FAO. "Globefish Highlights July 2020 Issue – A Quarterly Update on World (3 ed). No. 3." 2020.  
<https://doi.org/10.4060/cb1125en> (diakses 13 November 2020).
- FAO. "Globefish Research Programme", Vol. 117 (2015). Diakses di <http://www.fao.org/3/bc012e/bc012e.pdf> (diakses 26 Februari 2021).
- FAO. "Species Fact Sheets: *Thunnus obesus*".  
<http://www.fao.org/fishery/species/2498/en> (diakses 19 Januari 2021).
- FAO. "The Japanese market for seafood" 2015.  
<http://www.fao.org/3/bc012e/>

- bc012e.pdf* (diakses 13 Februari 2021).
- Indonesia Tuna. "A Movement Towards Better Tuna". 2018. <https://indonesiantuna.com/our-compliance/> (diakses 8 Februari 2021).
- Japan Customs. "Japan's Tariff Schedule as of Oct 1 2020." 2020. [https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020\\_10\\_data/e\\_03.htm/](https://www.customs.go.jp/english/tariff/2020_10_data/e_03.htm/) (diakses 2 Desember 2020).
- Japan for Sustainability. "Marine Eco-Label Japan Certifies Two More Fisheries", 2009. Diakses di [https://www.japanfs.org/en/news/archives/news\\_id029339.html](https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id029339.html) (diakses 25 April 2021).
- KBRI Tokyo. "Perubahan Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang 2020/2019." 2020. <https://www.dashboard.kbrito.kyo.jp/data-perdagangan-indonesiajepang> (diakses 2 Januari 2020).
- Kemendag. "Indonesia dan Jepang Percepat Penyelesaian General Review IJEPA". 13 Agustus 2018. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia-dan-jepang-percepat-penyelesaian-general-review-ijepa> (diakses 14 Februari 2021).
- Kemendag. "Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang tahun 2016-2020". Kemendag. 2021. <https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country> (diakses 14 Februari 2021).
- Kemenkeu. "Peraturan Kemenkeu RI No.30.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk." 2017. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/30~PMK.010~2017Per.pdf> (diakses 10 Desember 2020).
- KKP. "2017, Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan Indonesia Sebesar 750 Ton". 10 Oktober 2017. <https://news.kkp.go.id/index.php/2017-kuota-penangkapan-ikan-tuna-sirip-biru-selatan-indonesia-sebesar-750-ton/> (diakses 4 Desember 2020).
- KKP. "KKP Upayakan Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke Jepang". 25 Agustus 2017. <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-upayakan-pembebasan-tarif-bea-masuk-produk-perikanan-indonesia-ke-jepang/> (diakses 3 Maret 2021).
- KKP. "Pameran di Jepang KKP Catat Nilai Potensi Transaksi Ekspor Perikanan." 27 Agustus 2019. <https://kkp.go.id/artikel/13252-pameran-dijepang-kkp-catat-nilai-potensi-transaksi-ekspor-perikanan-usd-42-62-juta> (diakses 15 November 2020).
- Kumparan. "Lobby Tiada Henti Susi Demi Bebas Bea Masuk Ikan ke Jepang." 31 Mei 2018. <https://katadata.co.id/berita/2017/09/07/kejar-target->

*eksportikan-kkp-lobi-jepang-bebaskan-bea-masuk* (diakses 16 November 2020).

November 2020).

*Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)." 23 Agustus 2017. <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/thailand.html> (diakses 15 Desember 2020).*

Oceana. "Yellowfin Tuna". Diakses di <https://oceana.org/marine-life/ocean-fishes/yellowfin-tuna> (diakses 19 Januari 2021).

UN Comtrade. "Indonesian prepared tuna export to Japan 2006-2017". <https://comtrade.un.org/> (diakses 13 Februari 2021).

"Factsheet IJEPA." *Kemendag*. Mei 15, 2018. [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180515\\_factsheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_factsheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf) (diakses 15 Desember 2020).

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga." *BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38570/uu-no-2-tahun-2009> (diakses 15 November 2020).

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan." [http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2006/12/uu\\_17-2006.pdf](http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2006/12/uu_17-2006.pdf) (diakses 15